



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: 1. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN; 2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN; 3. Para Direktur Utama: Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III <i> Holding</i> (Persero).
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Rapat ke	:	2 (dua).
Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 Mei 2019.
W a k t u	:	Pukul 10.15 s.d 13.20 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI.
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN); 2. Mohamad Hekal, M.B.A (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FGerindra).
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	:	Membahas kesiapan Pemerintah dan BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di bulan Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
Hadir	:	dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI. 1. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN beserta jajaran; 2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi IAF) beserta jajaran; 3. Para Direktur Utama BUMN: Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III <i> Holding</i> (Persero) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi IAF), serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) dibuka pukul 10.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP adalah membahas kesiapan Pemerintah dan BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di bulan Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi IAF), serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) untuk menjelaskan mengenai kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di bulan Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi IAF), serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero).

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kesiapan Kementerian BUMN dan BUMN Pangan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dengan tetap menjaga kualitasnya di Bulan Suci Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri 1440 H, khususnya dalam menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada BUMN Pangan, dan mengoordinasikan BUMN lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di Bulan Suci Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri 1440 H.
3. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Pangan agar dalam melakukan ekspor pangan dengan tetap memperhatikan terpenuhinya kebutuhan konsumsi Pangan Pokok dan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Pangan agar dalam melakukan impor pangan dengan tetap memperhatikan Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
5. Komisi VI DPR RI meminta Perum BULOG dalam rangka pembelian/pengadaan gabah dan beras, dibeli langsung dari petani.

6. Komisi VI DPR RI mendukung Perum BULOG dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras.
7. Komisi VI DPR RI meminta agar Perum BULOG menyampaikan usulan dan kajian realokasi Penyertaan Modal Negara pada Perum BULOG dalam APBN Tahun Anggaran 2016 kepada Kementerian BUMN dan selanjutnya segera disampaikan kepada Komisi VI DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja PMN Komisi VI DPR RI.
8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengkaji terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Komisi VI DPR RI telah merencanakan melakukan kunjungan kerja spesifik pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 23 s.d. 25 Mei 2019 untuk melihat secara langsung pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh BUMN Pangan ke tiga provinsi yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**H. DITO GANINDUTO, M.B.A.
A-278**